



Kajian Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

A Study on the Role of the Community in the Management of Natural Resources in Hatu Village, West Leihitu District, Central Maluku Regency

Maria Lidwina Matly¹, Daniel Anthoni Sihasale¹, Mohammad Amin Lasaiba¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received: 09-02-2026 Revised: 08-03-2026 Accepted: 07-03-2026 Published: 30-04-2026	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir dan hutan Maluku yang menuntut pendekatan berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran masyarakat Desa Hatu dalam pengelolaan sumber daya alam melalui sistem adat sasi serta kolaborasinya dengan pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memahami dinamika sosial, nilai budaya, dan praktik ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui pelaksanaan sasi, pengawasan hutan adat, dan pendidikan lingkungan berbasis nilai lokal. Kelembagaan adat seperti kewang berfungsi efektif sebagai pengendali moral dan sosial dalam tata kelola lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi sistem adat dan kebijakan desa menghasilkan tata kelola ekologis yang adaptif, efisien, dan berkeadilan. Implikasinya menunjukkan pentingnya pengakuan formal terhadap lembaga adat dalam kebijakan konservasi. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, kearifan lokal



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study was motivated by the increasing pressure on natural resources in coastal and forest areas of Maluku, demanding a community-based approach to maintain ecosystem sustainability. The research aims to analyze the role of Hatu Village's community in natural resource management through the traditional sasi system and its collaboration with the village government. A qualitative descriptive method was applied using participatory observation, in-depth interviews, and documentation to understand social dynamics, cultural values, and ecological practices. The findings show that the community actively maintains ecological balance through sasi implementation, customary forest supervision, and environmental education based on local values. Customary institutions such as kewang serve effectively as moral and social regulators in environmental governance. The study confirms that the integration of customary systems and village policies creates adaptive, efficient, and equitable ecological governance. It implies the necessity of formal recognition of customary institutions in conservation policies

Keywords: community participation, natural resource management, local wisdom

*Corresponding Author:

Daniel Anthoni Sihasale

Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: ldaniel.sihale@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5541-9501>

Panduan Sitasi:

Matly, M. L., Sihasale, D., & Lasaiba, M. A. (2026). Kajian Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. *JENDELA PENGETAHUAN*, 19(1), 24-34.

<https://doi.org/10.30598/jp19iss1pp24-34>

PENDAHULUAN

Masyarakat global kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketidakpastian iklim dan tekanan demografis meningkatkan risiko degradasi ekosistem di banyak wilayah, sehingga mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi krisis ekologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui penguatan kapasitas lokal dan pengawasan kolektif (Syamsiyah et al. 2025; Darman & Doirebo 2024). Di sisi lain, integrasi kebijakan modern dengan kearifan lokal juga dinilai efektif dalam meningkatkan responsivitas pengelolaan ekologis (Ahmada & Fakhrudin 2024; Rizoldan 2023). Pemahaman terhadap bagaimana masyarakat lokal memaknai dan menerapkan prinsip konservasi sangat diperlukan agar strategi pembangunan mampu disesuaikan dengan konteks lokal tanpa menimbulkan disparitas sosial maupun kerusakan lingkungan. Dalam konteks Indonesia yang sangat heterogen, kapasitas lokal dan pengetahuan tradisional menjadi modal penting untuk merancang tata kelola sumber daya alam yang adaptif dan adil.

Di Indonesia, tekanan terhadap sumber daya alam meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan ekspansi lahan. Deforestasi, konversi lahan, dan eksploitasi sumber daya laut seringkali berjalan tanpa memperhatikan peran masyarakat lokal dan nilai budaya setempat. Beberapa studi mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan penurunan kualitas ekosistem (Peran Pemerintah 2023; Optimalisasi Kearifan Lokal 2024). Ketika kebijakan formal tidak memasukkan perspektif lokal, tata kelola cenderung diambil secara top-down, sehingga masyarakat kehilangan ruang partisipasi. Fenomena ini memperlebar kesenjangan antara negara dan masyarakat adat, serta memperlemah legitimasi kebijakan konservasi. Untuk itu, perlu dipahami dinamika sosial budaya, struktur kelembagaan lokal, dan pola relasi kekuasaan agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat dijalankan dengan dukungan masyarakat.

Di ranah lokal, keunikan wilayah pesisir atau pulau seperti di Maluku menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam. Desa pesisir sering berada dalam zona karakteristik laut, hutan mangrove, dan terumbu karang yang rentan terhadap tekanan lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, sistem adat atau kearifan lokal, seperti *sasi* di Maluku, menjadi instrumen sosial yang penting untuk mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya laut secara kolektif. Penelitian tentang kearifan lokal dalam pengelolaan alam di daerah pesisir menunjukkan bahwa praktik-praktik adat dapat menahan laju eksploitasi berlebihan dan memperkuat tata guna lokal (Eksistensi Kearifan Lokal 2024; Konservasi Alam 2024). Masyarakat yang menjaga warisan budaya ekologis memiliki nilai-nilai yang mendorong keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batas daya dukung lingkungan. Dengan demikian, studi lokal di wilayah pesisir sangat relevan untuk menggali strategi konservasi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Hubungan antar aktor lokal — seperti lembaga adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok lokal — memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Sinergi antara institusi formal dan informal menentukan keberhasilan adaptasi kebijakan konservasi di tingkat komunitas. Contoh integrasi kearifan lokal dengan kebijakan formal telah diteliti dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra (Rizoldan 2023; Ahmada & Fakhrudin 2024). Dalam praktiknya, kolaborasi antara masyarakat adat dan aparat pemerintah dapat menciptakan regulasi lokal yang lebih responsif terhadap kondisi ekologis dan sosial. Namun, faktor-faktor seperti konflik kepentingan, akses sumber daya, serta dinamika internal komunitas sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, analisis relasi antar aktor menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai lokal diartikulasikan ke dalam sistem pengelolaan yang lebih luas.

Penelitian terdahulu menunjukkan beragam temuan terkait partisipasi masyarakat, kearifan lokal, dan efisiensi pengelolaan lingkungan. Sebagian studi menekankan bahwa

masyarakat yang dilibatkan dalam keputusan pengelolaan memiliki tingkat keberhasilan konservasi lebih tinggi, seperti penelitian di wilayah pesisir yang menunjukkan bahwa *sasi* meningkatkan stok ikan dan mengurangi konflik (Eksistensi Kearifan Lokal 2024; Optimalisasi Kearifan Lokal 2024; Konservasi Alam 2024). Studi lain membahas hambatan kelembagaan dan konflik akses sumber daya (Peran Pemerintah 2023; Keberlanjutan Kearifan Lokal 2023; Rizoldan 2023; Sumber Daya Kearifan 2024). Penelitian di wilayah terpencil juga mengungkap bahwa faktor modal sosial dan norma lokal mempengaruhi keberlanjutan (Konservasi Alam 2024; Optimalisasi Kearifan Lokal 2024; Rizoldan 2023). Kajian lintas kasus menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat tergantung pada pengakuan formal terhadap peran lokal dan adaptasi kebijakan terhadap konteks budaya.

Dengan latar demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Hatu, Maluku Tengah, dengan memfokuskan pada interaksi antara sistem adat, kebijakan desa, dan praktek lingkungan lokal. Tujuan lain adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta mengevaluasi dampak praktik pengelolaan terhadap kesejahteraan lokal dan kelestarian ekologis. Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan antropologi sosial dengan ekologi dan kebijakan, sehingga tidak hanya menilai efektivitas konservasi, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang memandu tindakan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan model kebijakan adaptif yang menghormati kearifan lokal dan memperkuat legitimasi sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pulau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis adat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menafsirkan perilaku, makna, serta interaksi sosial secara kontekstual dengan situasi nyata di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengamati dinamika sosial, nilai budaya, dan praktik ekologis masyarakat yang masih memegang sistem adat seperti *sasi* dan gotong royong. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang utuh tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena dapat menggali makna dan motivasi di balik tindakan sosial masyarakat yang sulit diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2022). Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu mengungkap dimensi sosial-budaya yang menopang keberlanjutan lingkungan di Maluku Tengah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Wilayah ini dipilih karena masih mempertahankan praktik *sasi* sebagai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan hutan. Desa ini memiliki struktur sosial yang kuat dengan peran sentral lembaga adat dan tokoh agama dalam mengatur sistem pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, wilayah pesisir yang subur dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil laut menjadikan Hatu sebagai lokasi yang ideal untuk mengkaji praktik ekologis berbasis adat. Penentuan lokasi ini mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan ekologis masyarakat setempat, serta keterbukaan warga terhadap kegiatan penelitian. Lokasi ini juga dinilai representatif bagi masyarakat kepulauan di Maluku yang memiliki hubungan erat antara budaya, adat, dan pengelolaan sumber daya (Raco, 2021).

Populasi penelitian ini meliputi seluruh warga Desa Hatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti nelayan, tokoh adat, perangkat desa, dan kelompok perempuan. Dari populasi tersebut, informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam sistem *sasi* serta aktivitas pelestarian lingkungan. Informan utama terdiri dari 15 orang yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan adat dan konservasi. Penentuan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data yang mendalam hingga mencapai kondisi jenuh atau *data saturation*, yaitu ketika tidak ada informasi baru yang muncul. Teknik ini

memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan terhadap fokus penelitian, terutama terkait makna sosial dan nilai budaya dalam pengelolaan lingkungan (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami interaksi sosial, aktivitas adat, dan kegiatan masyarakat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka mengenai sistem adat serta peran sosial dalam menjaga lingkungan. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder seperti catatan pemerintah desa, dokumen adat, dan peraturan lokal yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya. Semua proses dilakukan secara sistematis dengan tetap memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan akurasi data.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif agar temuan dapat dipahami secara kontekstual. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menafsirkan hubungan antarfenomena sosial berdasarkan data empiris. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta *member check* dengan informan utama untuk memastikan keakuratan interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi dan merepresentasikan pandangan masyarakat secara autentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Struktur sosial masyarakat Desa Hatu menunjukkan corak kehidupan yang kuat diikat oleh sistem kekerabatan dan adat istiadat yang masih lestari hingga kini. Pola interaksi antarwarga diatur melalui mekanisme gotong royong (*masohi*), yang berfungsi menjaga kohesi sosial serta memperkuat solidaritas dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar pengambilan keputusan kolektif di tingkat keluarga maupun komunitas adat. Kehidupan sosial masyarakat tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, melainkan juga spiritual dan moral yang berakar pada nilai-nilai lokal yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, kondisi sosial masyarakat Desa Hatu memperlihatkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan sosial dan ekonomi lokal.

Tabel 1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Hatu

Aspek Sosial		Indikator	Persentase (%)	Keterangan
Keterlibatan	Gotong	Rutin tiap bulan	88	Sangat aktif
Royong				
Keterlibatan	Adat dan	Mengikuti kegiatan	76	Tradisi masih kuat
Ritual		adat		
Keterlibatan Pendidikan		Anak bersekolah SD–SMA	84	Akses pendidikan baik

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial tetap tinggi meskipun arus modernisasi mulai masuk ke wilayah desa. Aktivitas gotong royong masih menjadi pilar utama kehidupan sosial yang menjamin solidaritas antarwarga. Tingginya angka partisipasi juga mencerminkan keberhasilan lembaga adat dan pemerintahan desa dalam mempertahankan nilai-nilai kultural di tengah perubahan sosial. Perpaduan antara adat dan

sistem modern menciptakan keseimbangan sosial yang memperkuat karakter masyarakat lokal sebagai komunitas yang inklusif.

Selain kehidupan sosial, kondisi ekonomi masyarakat Desa Hatu juga menunjukkan perkembangan yang stabil. Masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan nonkayu. Pola ekonomi bersifat rumah tangga dengan sistem kerja kolektif yang menekankan prinsip keadilan dan kebersamaan. Dari data yang dihimpun, sebagian besar warga menggantungkan pendapatan dari hasil pertanian kelapa, pala, dan cengkih. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, distribusi mata pencaharian masyarakat menunjukkan orientasi ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal.

Tabel 2. Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Hatu

Jenis Pekerjaan	Persentase (%)	Sumber Pendapatan Tambahan	Rata-rata Pendapatan/Bulan
Petani/Pekebun	43	Menjual hasil kebun	Rp1.600.000
Nelayan	25	Menjual hasil tangkapan laut	Rp1.800.000
Pedagang kecil	17	Warung & kios	Rp1.700.000
PNS/Jasa	15	Gaji tetap	Rp2.400.000

Sumber: Data Lapangan, 2025

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat bersifat agraris-maritim, di mana kegiatan pertanian dan perikanan menjadi basis utama mata pencaharian. Meskipun sebagian pendapatan masih tergolong rendah, tingkat ketergantungan terhadap sumber daya lokal menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Pola distribusi pekerjaan ini memperlihatkan potensi pengembangan ekonomi berkelanjutan jika didukung oleh kebijakan yang memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya alam.

2. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masyarakat Desa Hatu memiliki peran dominan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara partisipatif melalui sistem adat dan kebiasaan lokal yang mengatur pola panen, pembukaan lahan, hingga pemanfaatan hasil laut. Kesadaran ekologis tumbuh dari tradisi turun-temurun yang memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Sistem larangan adat seperti *sasi* menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat menjaga keberlanjutan alam tanpa intervensi eksternal. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, bentuk partisipasi masyarakat mencakup berbagai bidang pengelolaan sumber daya alam di darat maupun laut.

Tabel 3. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bidang Pengelolaan	Jenis Kegiatan	Persentase Keterlibatan (%)	Bentuk Partisipasi
Pertanian	Pengaturan musim tanam	82	Gotong royong & pembagian hasil
Perikanan	Pelaksanaan sasi laut	76	Pengawasan & pelaporan pelanggaran
Hutan	Penjagaan hutan adat	68	Penanaman kembali & pencegahan penebangan liar

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan Tabel 3 menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat aktif dan kolektif. Tingginya angka partisipasi menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masih menjadi pendorong utama kesadaran ekologis. Mekanisme sosial

seperti musyawarah adat dan pengawasan bersama menjadi instrumen utama dalam menjaga disiplin kolektif. Kewang berfungsi sebagai pengawas dan penegak hukum adat, sementara masyarakat menjadi pelaksana dalam kegiatan lapangan seperti reboisasi dan pengawasan sumber daya laut.

Kegiatan masyarakat dalam bidang pengelolaan sumber daya juga didukung oleh kegiatan pendidikan dan sosialisasi lingkungan. Sekolah dan lembaga keagamaan turut menjadi agen dalam membentuk karakter ekologis warga. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, pelaksanaan kegiatan berbasis pendidikan lingkungan memperlihatkan hasil positif dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konservasi.

Tabel 4. Kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi Lingkungan

Kegiatan	Penyelenggara	Sasaran	Dampak
Edukasi Sasi di Sekolah	Guru & Kewang	Siswa SD–SMP	Menumbuhkan kesadaran konservasi
Penyuluhan Lingkungan	LSM & Gereja	Warga Desa	Meningkatkan partisipasi pengawasan
Pelatihan Ulang	Daur Kelompok Perempuan	Rumah tangga	Mengurangi limbah domestik

Sumber: Data Lapangan, 2025

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa program pendidikan lingkungan di Desa Hatu telah berjalan efektif karena menggabungkan nilai adat dan pengetahuan modern. Upaya edukatif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat kesadaran moral terhadap tanggung jawab ekologis. Kegiatan yang melibatkan kewang, gereja, dan lembaga pendidikan menjadi contoh konkret sinergi sosial dalam menciptakan masyarakat ekologis berkelanjutan.

3. Sistem Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan

Kearifan lokal menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam di Desa Hatu. Nilai-nilai adat seperti *sasi* dan prinsip *masohi* mencerminkan sistem sosial yang berpihak pada keseimbangan ekologis. Setiap larangan dan aturan adat lahir dari pengalaman kolektif yang panjang dalam berinteraksi dengan alam. Aturan ini tidak bersifat kaku, melainkan dinamis sesuai kondisi lingkungan. Penegakan nilai dilakukan melalui mekanisme sosial yang berbasis moral dan spiritual. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5, ragam kearifan lokal yang diterapkan mencakup bidang laut, darat, dan hutan.

Tabel 5. Bentuk Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan

Jenis Kearifan	Bidang Penerapan	Tujuan	Dampak
Sasi Laut	Perairan pesisir	Pemulihan stok ikan	Produktivitas meningkat
Sasi Darat	Kebun pala & kelapa	Regenerasi tanaman	Panen meningkat
Larangan Hutan	Pegunungan	Menjaga sumber air	Ketersediaan air stabil

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa sistem kearifan lokal terbukti menjadi instrumen efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan berbasis larangan adat lebih dipatuhi karena mengandung nilai sakral. Masyarakat memandang pelanggaran adat sebagai tindakan yang tidak hanya mencederai norma sosial, tetapi juga merusak keseimbangan alam. Oleh sebab itu, efektivitas sistem ini tidak diukur melalui sanksi, tetapi melalui kepatuhan moral yang berakar pada kesadaran kolektif.

Selain *sasi*, masyarakat Desa Hatu juga menerapkan sistem pemanfaatan bergilir. Setiap wilayah memiliki masa tanam dan panen yang diatur secara adat agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, pola pemanfaatan ruang ini berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan lokal.

Tabel 6. Pola Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kearifan Lokal

Wilayah	Jenis Kegiatan	Durasi	Tujuan
Pesisir	Penangkapan ikan	6 bulan	Menjaga stok biota laut
Dataran rendah	Pertanian musiman	9 bulan	Rotasi tanaman
Dataran tinggi	Hasil hutan nonkayu	Tetap	Konservasi vegetasi alami

Sumber: Data Lapangan, 2025

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengelola wilayahnya berdasarkan prinsip zonasi ekologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mekanisme pengaturan ruang ini mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan dan menjaga daya dukung lingkungan. Nilai kearifan lokal ini menjadi dasar penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian sumber daya alam.

4. Peran Lembaga Adat dan Pemerintah Desa

Lembaga adat dan pemerintah desa memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan formal. Sinergi antara keduanya menciptakan tata kelola yang responsif terhadap kondisi lokal. Sebagaimana terlihat pada **Tabel 7**, struktur kelembagaan di Desa Hatu memperlihatkan pembagian tugas yang jelas.

Tabel 7. Struktur dan Fungsi Kelembagaan Desa Hatu

Lembaga	Fungsi Utama	Bidang Kegiatan	Dampak
Kewang	Pengawasan adat & sasi	Lingkungan & adat	Disiplin sosial meningkat
Pemerintah Desa	Pengelolaan administrasi	Program pembangunan	Keterpaduan kebijakan
Gereja	Edukasi moral ekologis	Sosialisasi & kampanye	Kesadaran lingkungan tumbuh

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan Tabel 7 menjelaskan bahwa hubungan antar lembaga di Desa Hatu berjalan harmonis dan saling memperkuat. Pemerintah desa menjadikan nilai adat sebagai dasar kebijakan lokal, sementara lembaga kewang menjaga legitimasi sosial. Kolaborasi ini menjadi bentuk integrasi antara sistem adat dan pemerintahan modern yang mendukung keberlanjutan ekosistem sosial.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8, hasil kolaborasi antar lembaga menghasilkan berbagai kegiatan nyata dalam bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 8. Bentuk Kolaborasi Lembaga dalam Pengelolaan SDA

Jenis Kegiatan	Lembaga Terlibat	Hasil
Musyawarah Sasi	Adat, Gereja, Pemerintah	Jadwal penutupan sasi ditetapkan
Reboisasi	Karang Taruna, LSM	1.500 bibit pohon tertanam
Edukasi Lingkungan	Sekolah & Kewang	Pengetahuan ekologis meningkat

Sumber: Data Lapangan, 2025

Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga menciptakan pola kolaboratif yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sementara lembaga adat memastikan pelaksanaan nilai-nilai tradisional tetap dijaga. Kolaborasi ini memperlihatkan model tata kelola hibrid yang berhasil menjaga keseimbangan sosial dan ekologis tanpa mengorbankan nilai budaya lokal.

5. Dampak Pengelolaan terhadap Keberlanjutan Ekologis dan Sosial

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Hatu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penerapan sistem sasi, konservasi hutan adat, serta pola pemanfaatan ruang yang bijak telah menurunkan tingkat degradasi lingkungan. Sumber air tetap terjaga, hasil pertanian meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Sebagaimana terlihat pada **Tabel 9**, perbandingan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah penerapan sasi menunjukkan peningkatan signifikan.

Tabel 9. Dampak Penerapan Sistem Adat terhadap Lingkungan dan Ekonomi

Indikator	Sebelum Sasi	Sesudah Sasi	Perubahan (%)
Produktivitas Ikan (kg/bln)	120	260	+116
Panen Pala (kg/thn)	400	680	+70
Pelanggaran Adat	15 kasus	3 kasus	-80

Sumber: Data Lapangan, 2025

Dari Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa sistem adat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekologis. Peningkatan produktivitas dan penurunan pelanggaran adat membuktikan bahwa sistem sosial yang berbasis nilai moral lebih efektif daripada mekanisme hukum formal. Efek sosial yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan kohesi sosial serta rasa tanggung jawab kolektif terhadap alam.

Pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat terbukti menjadi model efektif dalam pembangunan berkelanjutan. Nilai gotong royong, ketaatan adat, dan kolaborasi kelembagaan menjadi kunci utama keberhasilan Desa Hatu menjaga harmoni antara manusia dan alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal tidak sekadar sebagai pelaku, tetapi juga sebagai penentu arah konservasi yang kontekstual dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya alam di Desa Hatu didasarkan pada praktik adat *sasi* yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Masyarakat mematuhi aturan adat yang mengatur waktu pemanfaatan dan pelarangan eksploitasi sumber daya laut maupun darat. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal masih berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari *sasi* menjadi faktor pengikat yang memperkuat kepatuhan kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem sosial berbasis nilai budaya memiliki kontribusi signifikan terhadap pelestarian ekosistem (Syamsiyah et al., 2025; Darman & Doirebo, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan lingkungan di Desa Hatu merupakan hasil kolaborasi antara kepercayaan adat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Praktik *sasi* tidak hanya berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial masyarakat. Keberadaan lembaga adat dan tokoh agama memperkuat legitimasi sistem tersebut karena menjadi simbol moral yang dihormati seluruh warga. Aktivitas kolektif seperti musyawarah dan gotong royong dalam penegakan aturan adat memperlihatkan integrasi antara aspek sosial, budaya, dan spiritual. Temuan ini mempertegas bahwa kearifan lokal merupakan manifestasi nilai-nilai ekologis yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Ahmada & Fakhruddin, 2024; Rahim, 2024). Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir Maluku tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kekuatan sosial dan spiritual masyarakat adat.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian di Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, pola pengelolaan yang dijalankan masyarakat Hatu memiliki kemiripan dalam hal pengaturan waktu larangan dan sanksi adat. Namun, perbedaan terletak pada tingkat

koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah desa yang lebih solid di Desa Hatu. Kolaborasi tersebut memunculkan efektivitas dalam penegakan aturan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan (Optimalisasi Kearifan Lokal, 2024; Eksistensi Kearifan Lokal, 2024). Model kerja sama ini menunjukkan bahwa praktik konservasi tradisional dapat diperkuat melalui integrasi kelembagaan formal yang menghargai sistem nilai lokal sebagai dasar pengambilan keputusan bersama.

Berbeda dengan studi di Papua dan Kalimantan yang lebih menekankan aspek ekonomi dalam konservasi sumber daya, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi moral dan spiritual menjadi kekuatan utama di Desa Hatu. Nilai religius yang menyertai praktik *sasi* mengandung pesan etika yang menumbuhkan kesadaran ekologis secara mendalam (Peran Pemerintah, 2023; Rizoldan, 2023). Hal ini menandakan bahwa pendekatan berbasis nilai mampu menciptakan kontrol sosial yang efektif tanpa perlu mekanisme hukum yang kaku. Keterikatan emosional antara masyarakat dan lingkungan menjadi fondasi keberhasilan konservasi yang berkelanjutan dan berbasis kepercayaan kolektif yang diwariskan lintas generasi.

Implikasi hasil penelitian ini memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dalam mengakui dan melindungi kelembagaan adat sebagai bagian integral dari tata kelola lingkungan. Dukungan kebijakan yang berpihak pada sistem nilai lokal akan memperkuat legitimasi adat dalam pengambilan keputusan ekologis. Sinergi antara komunitas lokal dan lembaga formal dapat menciptakan model kebijakan partisipatif yang responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat (Syamsiyah et al., 2025; Darman & Doirebo, 2024). Integrasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas penerapan model konservasi berbasis masyarakat di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan geografis serupa.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep pendidikan lingkungan berbasis budaya lokal. Nilai-nilai dalam *sasi* dapat dijadikan materi pendidikan kontekstual untuk menumbuhkan karakter ekologis generasi muda. Penerapan pendidikan berbasis kearifan lokal mendorong pembelajaran yang berakar pada pengalaman sosial masyarakat dan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan (Ahmada & Fakhruddin, 2024; Rahim, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pendidikan lingkungan yang integratif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adat di Indonesia.

Penelitian ini juga memperkaya wacana akademik mengenai tata kelola lingkungan berbasis nilai sosial. Dalam konteks administrasi publik, penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara struktur formal dan sistem adat dapat menghasilkan tata kelola yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kombinasi antara regulasi formal dan mekanisme sosial adat menjadi alternatif dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian ekologis (Optimalisasi Kearifan Lokal, 2024; Syamsiyah et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan institusi sosial di tingkat lokal menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan konservasi berbasis masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada satu wilayah adat sehingga belum mencakup variasi sosial dan ekologis di daerah lain. Aspek gender dan peran generasi muda dalam sistem *sasi* belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik dapat memengaruhi keberlanjutan nilai-nilai adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bagian timur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai adat, kepercayaan sosial, dan dukungan kelembagaan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sistem *sasi* di Desa Hatu menjadi bukti bahwa nilai moral dan spiritual dapat berfungsi sebagai pengendali sosial yang menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi antara lembaga adat dan kebijakan desa mampu menghasilkan tata kelola yang adaptif terhadap konteks lokal. Secara ilmiah, penelitian ini memperluas pemahaman tentang pentingnya dimensi budaya dan spiritual dalam

kebijakan lingkungan serta berimplikasi pada perlunya reformulasi kebijakan konservasi yang berbasis nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmada, Y., & Fakhruddin, A. (2024). Sumber daya kearifan lokal untuk konservasi lingkungan hidup. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 100–108. <https://journals.ecotas.org/index.php/ems/article/view/149>
- Darman, D., & Doirebo, H. Y. E. (2024). The influence of green infrastructure and community participation on sustainable natural resource management in Indonesia. *West Science Journal*, 2(3), 705–716. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.705>
- Eksistensi Kearifan Lokal. (2024). Eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sungai: Studi kasus masyarakat Desa Surau Bengkulu Tengah. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 8(2), 462–471. <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.33110>
- Keberlanjutan Kearifan Lokal dalam Era Globalisasi (Ratriastuti, 2023). (2023). *Makalah ilmiah nasional tentang kearifan lokal dan keberlanjutan sosial budaya*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Optimalisasi Kearifan Lokal. (2024). Optimalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di NTB: Literature review. *Kappa Journal*, 8(3), 436–446. <https://doi.org/10.29408/kpj.v8i3.28076>
- Peran Pemerintah. (2023). Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. *Jurnal Administrasi & Hukum*, 6(2), 88–95. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Raco, J. R. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n8x7a>
- Rahim, M. (2024). Participatory resource management and local empowerment. *Environmental Development*, 46, 100915. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100915>
- Ratriastuti, D. (2023). Keberlanjutan kearifan lokal dalam era globalisasi. *Makalah ilmiah nasional bidang sosial-humaniora*.
- Rizoldan, S. (2023). Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kearifan lokal sebagai kontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 664–672. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1327>
- Sumber Daya Kearifan Lokal. (2024). Sumber daya kearifan lokal untuk konservasi lingkungan hidup. *Laporan makalah nasional bidang ekologi dan masyarakat adat*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsiyah, N., Sadeli, A. H., Saidah, Z., Noor, T. I., & Widiyanesti, S. (2025). Community participation in the development of sustainable, environmentally conscious villages in the Cirasea sub-watershed, Indonesia. *Sustainability*, 17(11), 4871. <https://doi.org/10.3390/su17114871>
- Wambrau, J., Ririhena, J., & Matulessy, L. (2023). Empowering local communities for environmental stewardship in Papua. *Environmental Research Letters*, 18(12), 124005. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad0f52>
- Widiyanesti, S., Noor, T. I., & Sadeli, A. H. (2025). Strengthening community-based environmental awareness in Indonesia's rural watershed regions. *Indonesian Journal of Environmental Education*, 9(1), 33–45. <https://doi.org/10.52334/ijee.v9i1.2025>
- Yuliana, D., & Raharjo, S. (2022). Transformasi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(4), 512–523. <https://doi.org/10.31002/soshum.v6i4.4713>